



Gita Setra

HIMBAUAN DARI DAN UNTUK LAPANGAN

ISSN : 0854 - 4956



CGS

Daftar Isi

Gita Utama,

Strategi Pemberdayaan

Masyarakat: Konsep dan

Penerapannya, 1

Gita Selingan,

- ◎ Deklarasi Hamburg tentang Proses Belajar Orang Dewasa, 11
- ◎ Mother of Sport, 22

Aneka Kegiatan,

- ◎ Catatan dari Sosialisasi PLS 2000, 27
- ◎ Unjuk kemampuan KBO binaan SKB se Jawa Barat, 29



Penanggung jawab:
Kepala BPKB Jawa Barat

Pimpinan Redaksi:
Drs. Rustam Effendy

Sekretaris Redaksi:
Surono, S.Pd.

Dewan Redaksi:
Drs. Dadang Sudarman T
Merry Mariam, M.Pd.
Drs. Dadan Supriatna
Unus Nasrudin, S.Pd.
Drs. Benny Benjamin L
Paiman Umar

Illustrator:
Endang Djumaryana

Fotografer:
Parwoto

Distributor:
Edi Purwanto

Penerbit/Pencetak:
BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN
BELAJAR (BPKB) JAWA BARAT
Jl. Jayagiri No. 63
Kec. Lembang Kabupaten Bandung
Kode Pos 40391
Telp. (022) 2786017,
Fax. (022) 2787474
e-mail: bpkb_jg@indo.net.id

Departemen Pendidikan Nasional
Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat
Tahun 2000



GS

Pengantar

Di penghujung tahun 2000 Krisis Ekonomi yang melanda negeri ini belum kunjung padam! Upaya-upaya untuk mengatasi masalah tersebut telah pula disinggung pada Gita Setra Edisi Juli 2000, No. 57, yakni tentang Pemberdayaan Masyarakat. Demikian halnya dengan isu utama Gita Setra Edisi Oktober 2000, No. 58 masih mengutak-atik konsep yang berkisar seputar Strategi Pemberdayaan Masyarakat.

Kami menyadari konsep tersebut datangnya 'kesiangan' namun redaksi sengaja menyajikannya sebagai bahan sandingan dan perbandingan konsep pemberdayaan masyarakat yang tengah berlangsung.

Adanya isu jender berimplikasi terhadap pendidikan orang dewasa yang 'dinilai' masih kurang adil dan merata sehingga peserta Konferensi Internasional Pendidikan Orang Dewasa mendeklarasikan 27 butir rambu-rambu tentang pendidikan orang dewasa. Berita ini kami cuplik dari hasil terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Prof. DR. W.P. Napitupulu.

Ke-27 butir Pendidikan Orang Dewasa tersebut dapat anda simak pada isi Gita Setra kali ini, informasi ini pun datangnya 'kesiangan' tapi mudah-mudahan masih layak anda ketahui, mengingat kebijakan dan konsep pendidikan orang dewasa merupakan pijakan sebagian besar program-program PLS.

Rentetan informasi kami lengkapi pula dengan seputar tentang Atletik, catatan dari penyelenggaraan Sosialisasi PLS 2000 di Jakarta dan sekilas tentang penyelenggaraan uji kemampuan KBO Binaan SKB Jawa Barat di SKB Kabupaten Pandeglang.



Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Konsep dan Penerapannya

Penyadur:

Dadang Sudarman Trisutalaksana
PB BPB Jawa Barat

Pengantar

Pemberdayaan masyarakat telah disepakati sebagai strategi pembangunan nasional saat ini. Berbagai kajian dan bahkan implementasi fungsional ke dalam strategi pembangunan sektor telah dilakukan, termasuk pembangunan di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga melalui pendekatan *community based education* (pendidikan berbasis masyarakat). Sebagai sebuah strategi nasional sudah barang tentu mengandung prinsip dasar yang akan terlihat sama pada setiap sektor pembangunan di mana strategi tersebut difungsionalkan.

Tulisan berikut ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang prinsip dasar dari strategi *pemberdayaan masyarakat* sehingga

diharapkan akan pula memberikan penguatan pemahaman terhadap implementasi strategi tersebut ke dalam strategi pembangunan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga yang selama ini tengah dilakukan. Memang dari sisi ketepatan waktu, informasi ini agak “kesiangan”, karena implementasi strategi ini tengah dilakukan. Namun demikian, melalui tulisan ini masih tersisa harapan untuk dijadikan bahan bandingan dan sandingan atas penerapan strategi pemberdayaan masyarakat yang sedang dioperasionalkan. Sehingga diharapkan akan muncul gagasan evaluatif terhadap pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat yang tengah dioperasionalkan dan muncul aktivitas kreatif dalam menajamkan strategi tersebut agar lebih berhasil guna dan berdaya guna berdasarkan situasi dan kondisi nyata di lapangan.

Konsep strategi pemberdayaan ini, kecuali bagian kesimpulan, disadur dari booklet *Yang Menghasilkan Harus Menikmati, Yang Menikmati Harus Menghasilkan*. Booklet ini dikeluarkan oleh Sekretariat Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat. Sekretariat ini merupakan sekretariat dari Tim Koordinasi Pusat untuk Pengelolaan Bantuan Daerah bagi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor Kep.330/K/11/1998. Sekretariat ini berfungsi untuk menjembatani komunikasi antar lintas pelaku pembangunan, agar terjadi sinergi yang akan mempercepat tercapainya masyarakat adil dan sejahtera.

Mengapa perlu strategi pemberdayaan masyarakat?

Terdapat tiga hal yang menjadi dasar kuat bagi penerapan strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu (1) ketimpangan perolehan hasil-hasil pembangunan, (2) kemiskinan, dan (3) otonomi daerah. Dua hal pertama dari ketiga hal tersebut merupakan faktor yang mendasar

yang timbul dari akibat perencanaan pembangunan yang kurang berorientasi kepada potensi riil dan kebutuhan nyata masyarakat yang diwujudkan melalui pendekatan perencanaan pembangunan *alir atas-bawah* (top down).

Hakekat tujuan pembangunan adalah meningkatkan upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Berpijak dari hakekat ini, maka pencapaian dilakukan melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, dengan menggunakan instrumen-instrumen pembangunan yang telah disepakati. Intervensi yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat seyogianya didasarkan pada sebuah rencana pembangunan yang mencerminkan berbagai potensi riil masyarakat. Pada kenyataannya, dari perolehan hasil-hasil pembangunan yang dicapai sampai saat ini masih terdapat berbagai ketimpangan atau kesenjangan. Kesenjangan atau ketimpangan tersebut dialami baik oleh antar wilayah, antar sektor pembangunan maupun antar lapisan masyarakat.

Pada sisi yang lain, kondisi ketimpangan tersebut memunculkan pula kemiskinan pada sebagian masyarakat. Kemiskinan ini terutama disandang oleh masyarakat di perdesaan tertinggal. Untuk ini diperlukan upaya penanggulangan yang dapat (1) sebagai pemicu dan pemacu gerakan penanggulangan kemiskinan, (2) merupakan strategi pemerataan dan penajaman program pembangunan yang ditujukan kepada penduduk miskin terutama di desa tertinggal, dan (3) sebagai upaya pengembangan kegiatan ekonomi rakyat dalam struktur yang tumbuh dari kemampuan masyarakat sendiri.

Otonomi daerah pada dasarnya dapat dianggap sebagai sebuah keharusan dalam mencapai kesejahteraan yang merata bagi bangsa Indonesia. Disadari bahwa dengan *potensi dasar* (endowment factors) yang sangat berbeda untuk setiap wilayah di Indonesia, pada akhirnya akan bermuara pada kemampuan pendanaan

pembangunan daerah yang beragam. Namun di sisi lain tumbuh semangat yang kuat untuk segera melaksanakan otonomi daerah. Semangat ini dilandasi atas kesadaran bahwa perencanaan pembangunan suatu daerah haruslah merupakan cerminan dari segala potensi dan kendala yang ada di wilayahnya. Untuk itu tidak pada tempatnya bagi sebuah daerah untuk menerapkan perencanaan pembangunan yang diadopsi tanpa reserve dari perencanaan yang bersifat *alir atas-bawah* (top-down). Hal yang menjadi pertimbangan untuk ini adalah semakin kuatnya pengembangan potensi daerah, akan mewujudkan percepatan pembangunan. Dari kondisi ini pada akhirnya akan bermuara pada pertumbuhan makro nasional yang lebih merata. Kemajuan pembangunan di daerah, secara otomatis juga menimbulkan harapan-harapan munculnya peluang peningkatan kesejahteraan, baik di daerah maupun di pusat.

Apa arah strategi pemberdayaan masyarakat?

Visi strategi pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkemampuan untuk melakukan perbaikan kondisi sosial ekonomi dan martabatnya secara berkelanjutan. Wujud akhir dari visi tersebut adalah masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, dan berkeadilan, serta sadar akan hak dan kewajibannya dalam proses pembangunan.

Berdasarkan visi tersebut maka misi strategi pemberdayaan adalah:

- ◆ memberdayakan masyarakat,
- ◆ mendorong perubahan struktur masyarakat, dan
- ◆ pengembangan *kapasitas masyarakat* (*capacity building*) melalui pengembangan dan pemantapan kondisi sosial ekonomi.

Konsekwensi logis dari visi dan misi tersebut adalah perlu adanya perubahan kerangka pikir pembangunan, yakni yang berpusat pada

manusianya (people-centered development) melalui proses yang dilakukan secara demokratis. Dengan kata lain, proses pembangunan yang dilakukan dapat menjamin tumbuhnya peningkatan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Peran serta masyarakat inilah yang akan menciptakan proses yang diupayakan sendiri dari kemampuan masyarakat, diselenggarakan oleh masyarakat, dan hasilnya dinikmati seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat itu sendiri (DOUM - **Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat**).

Berpijak dari kerangka pikir tersebut, maka program pemberdayaan dalam suatu sistem perencanaan pembangunan harus merupakan upaya untuk menajamkan langkah-langkah ke arah kondisi yang lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam aspek mekanisme penyaluran bantuan maupun dalam aspek pelaksanaan program dan kegiatan yang langsung dilaksanakan sendiri oleh masyarakat melalui berbagai lembaga yang dimiliki masyarakat. Sehingga dengan demikian program pemberdayaan harus pula mendorong pada upaya penyerasian antara perencanaan pembangunan *alir atas-bawah* (top-down planning) dan *alir bawah-atas* (bottom-up planning).

Bagaimana penerapan strategi pemberdayaan masyarakat?

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi nasional ditujukan untuk, (1) menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan, (2) meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban, (3) meningkatkan potensi lokal; sosial, budaya, manusia, dan alam, (4) meningkatkan taraf hidup dan martabat masyarakat, dan (5) meningkatkan kapasitas berbagai lembaga yang ada di masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, strategi pemberdayaan masyarakat diterapkan melalui:

1. pengembangan ekonomi masyarakat,
2. pengembangan sumber insani (pendidikan),

3. pengembangan prasarana dasar,
4. pengurangan hambatan birokrasi,
5. penguatan kelembagaan masyarakat lokal,
6. peningkatan peranan adat dan budaya yang produktif, serta
7. peningkatan akses informasi; pasar, kapital, manajemen, dan produksi ke masyarakat

Dari pelaksanaan strategi tersebut melalui berbagai program aksi, diharapkan tercipta capacity building bagi masyarakat, maupun pada aparatur pemerintah. Bagi masyarakat, akan terjadi:

- ◆ proses pemberdayaan (community empowerment),
- ◆ penguatan kelembagaan di tingkat lokal masyarakat (institutional strengthening),
- ◆ pemberian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat, dan
- ◆ kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung pada kegiatan pembangunan, sehingga ikut pula menentukan secara langsung proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerahnya.

Penerapan strategi pemberdayaan bukan tidak mungkin akan menghadapi serangkaian tantangan dalam proses penerapannya di berbagai sektor pembangunan. Di antara serangkaian tantangan tersebut yang paling kritis adalah adanya saling ketidakpercayaan antar lintas pelaku pembangunan, baik antara pemerintah dan masyarakat, ataupun organisasi non pemerintah dengan elemen masyarakat lain. Oleh karena itu kondisi utama yang perlu ditumbuhkan dalam penerapan strategi pemberdayaan masyarakat adalah saling kepercayaan di antara yang *memberdayakan* dengan yang *diberdayakan*, baik pada elemen pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

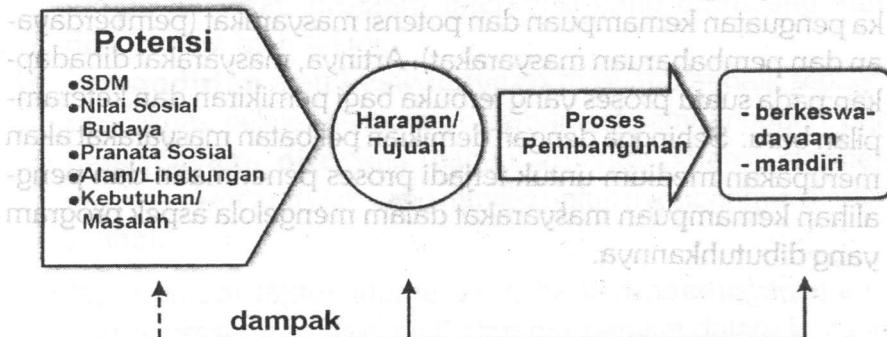
Kesimpulan

Merujuk pada makna konsepsi strategi pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa simpulan yang dapat dipelajari, dihayatkan dan diimplementasikan sebagai nilai-nilai pendidikan, baik bagi yang *memberdayakan* maupun yang *diberdayakan*. Hal ini menjadi penting, karena strategi pemberdayaan masyarakat tidak hanya sekedar strategi tentang bagaimana mengelola pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna. Tetapi jauh dari itu merupakan suatu proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan sikap dan keterampilan mental sebagai pelaku pembangunan (yang *memberdayakan* maupun yang *diberdayakan*) yang berkeswadayaan dan mandiri.

Beberapa simpulan dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah merupakan suatu upaya untuk meningkatkan **kualitas sumberdaya manusia** sehingga memiliki **kemampuan** untuk mendayagunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya dan **berinisiatif** serta **berpartisipasi** dalam meningkatkan taraf hidup dan lingkungannya.

Gambar 1. Hakekat Pemberdayaan Masyarakat



2. Strategi pemberdayaan diterapkan berdasarkan dua alasan berikut. **Pertama**, upaya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama yang peka dan aktif pada seluruh kegiatan pembangunan berdasarkan: kondisi sumberdaya yang dimiliki dan potensi sumberdaya yang dapat dikuasainya. **Kedua**, upaya memposisikan peran pemerintah sebagai fasilitator bagi masyarakat agar peran pelaku utama yang peka dan aktif dapat terwujud. Kedua alasan tersebut beranjaku dari pandangan bahwa suatu program intervensi (program/proyek/kegiatan) yang benar-benar melibatkan masyarakat akan mengarah kepada keberhasilan program itu sendiri dan sekaligus membangun masyarakat kelompok sasarannya.

Masyarakat sebagai pelaku utama mengandung pengertian bahwa seluruh aspek manajemen program/proyek/kegiatan intervensi pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian konteks pelibatan masyarakat sebagai wujud kongkrit dari pemberdayaan masyarakat dalam program tersebut bukan untuk mengarahkan masyarakat sebagai pelaksana tetapi memberikan kondisi agar masyarakat dapat melakukan pengembangan aspek program yang dibutuhkannya dan sekaligus memberikan perspektif terhadap kepentingan pembangunan yang lebih luas.

Fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dalam kerangka penguatan kemampuan dan potensi masyarakat (pemberdayaan dan pembaharuan masyarakat). Artinya, masyarakat dihadapkan pada suatu proses yang terbuka bagi pemikiran dan keterampilan baru. Sehingga dengan demikian pelibatan masyarakat akan merupakan medium untuk terjadi proses penerimaan dan pengalihan kemampuan masyarakat dalam mengelola aspek program yang dibutuhkannya.

3. Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai upaya fasilitasi dari unsur di luar masyarakat akan terkait dengan aspek perilaku (psiko-sosial), budaya dan politik, dan mata pencarian. Ketiga aspek atau dimensi tersebut saling mempengaruhi sehingga baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama akan berpengaruh terhadap tingkat kesiapan masyarakat untuk melibatkan diri atau dilibatkan dalam suatu program pembangunan.

Gambar 2. Dimensi Pemberdayaan Masyarakat



4. Merujuk pada makna dasar dan dimensi yang terkandung di dalamnya maka hasil akhir dari proses pelibatan masyarakat dalam kerangka pembangunan yang berperspektif pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya:
- rasa memiliki** dari warga masyarakat termasuk kelembagaannya terhadap program intervensi yang dirancang atau diluncurkan oleh sektor,
 - kemandirian** atau **keswadayaan** masyarakat baik sebagai penggagas, pelaksana maupun pemanfaat pembangunan, dan
 - kepercayaan diri** yang mapan terhadap potensi, sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki untuk membangun dirinya sendiri.
5. Terdapat empat faktor utama yang berkecenderungan mempengaruhi proses dan hasil pelibatan masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut.

a. Kebutuhan

Kejelasan kebutuhan dari yang *diberdayakan* maupun yang *memberdayakan*. Kebutuhan dimaksud meliputi masalah berikut potensi dan sumberdaya *pemecahannya* yang tersedia di lingkungannya maupun yang harus diraih di luar lingkungannya.

- ❖ yang diberdayakan, mengetahui dan memahami kebutuhan berikut prioritasnya yang terkait dengan peningkatan hidup dan kehidupannya.
- ❖ yang memberdayakan mengetahui pasti potensi dan sumberdaya yang dapat didayagunakan secara efektif dalam memberdayakan dan masalah yang ada dan yang mungkin muncul dalam proses memberdayakan.

b. Kepercayaan

Kepercayaan timbal balik antara yang *memberdayakan* (pemerintah) dan yang *diberdayakan* (masyarakat), terutama tentang:

- ❖ kemauan dan itikad untuk saling membantu, dan
- ❖ potensi dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing

c. Kesempatan

Kesempatan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk ikut membantu mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat melalui program-program pembantuan. Sebaliknya, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuan membangun dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan yang dimilikinya.

c. Keleluasaan

Keleluasaan masyarakat untuk melaksanakan kepercayaan dan kesempatan yang diberikan serta mengembangkan kreatifitas yang dimilikinya dalam proses pembangunan yang ditujukan kepadanya.



Gita Selingan

Deklarasi HAMBURG

tentang Pendidikan Orang Dewasa

Cuplikan dari:

Konferensi Internasional Kelima tentang
Pendidikan Orang Dewasa, 14-18 Juli 1997.
Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
oleh Prof. Dr. W.P. Napitupulu Ketua Harian
Komisi Nasional untuk UNESCO

1. Kami, para peserta Konferensi Internasional Kelima tentang Pendidikan Orang Dewasa yang berkumpul di Kota 'Free and Hanseatic' Hamburg, menegaskan kembali bahwa hanya pembangunan berpusatkan manusia dan masyarakat yang berperanserta, didasarkan pada penghormatan penuh pada hak-hak asasi manusia yang akan mengarah pada pembangunan yang berlanjut dan merata. Peranserta kaum pria dan wanita yang tahu dan mangkus di dalam setiap bidang kehidupan diperlukan, jika kemanusiaan akan tetap hidup dan menghadapi tantangan-tantangan masa depan.

2. Dengan demikian, pendidikan orang dewasa menjadi lebih daripada suatu hak; ia menjadi kunci ke abad XXI. Hal itu merupakan,

baik sebagai akibat kewarganegaraan yang aktif maupun kondisi untuk berperan serta penuh di dalam masyarakat. Itulah pemikiran yang kuat bagi pemeliharaan pembangunan berkelanjutan yang ekologis, untuk memajukan demokrasi, dan untuk membangun dunia di mana perselisihan kekerasan diganti oleh dialog (percakapan) dan kebudayaan perdamaian didasarkan pada keadilan. Proses belajar orang dewasa dapat membentuk identitas dan memberi makna pada kehidupan. Belajar sepanjang hayat berarti memikirkan ulang isi yang mengungkapkan faktor-faktor, seperti usia, kesamaan jender, kecacatan, bahasa, kebudayaan dan disparitas (perbedaan) ekonomi.

3. Pendidikan orang dewasa berarti seluruh kumpulan proses belajar yang berlangsung formal atau tidak, di mana rakyat yang dianggap dewasa oleh masyarakat tempatnya bermukim, mengembangkan kemampuan-kemampuan, memperkaya pengetahuan, dan memperbaiki kualifikasi teknis atau professionalitas mereka atau membimbing mereka ke arah hal-hal baru dalam memenuhi kebutuhan mereka dan kebutuhan masyarakatnya. Proses belajar orang dewasa yang meliputi pendidikan formal dan berkelanjutan, non-formal dan spectrum belajar ‘informal’ dan kebetulan (sambil lalu) yang terdapat di dalam masyarakat belajar multibudaya, di mana pendekatan-pendekatan berdasarkan teori dan praktik diakui.

4. Walaupun isi proses belajar orang dewasa dan pendidikan anak-anak dan remaja akan berbeda menurut konteks ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya, dan kebutuhan rakyat di dalam masyarakat di mana hal itu berlangsung, namun keduanya adalah unsur-unsur yang diperlukan dari visi pendidikan yang baru di mana proses belajar menjadi benar-benar berlangsung sepanjang hayat. Perspektif belajar sepanjang hayat memerintahkan saling melengkapi dan kontinuitas seperti itu. Iuran potensial dari pendidikan orang dewasa dan berkelanjutan dalam membentuk warga negara yang tahu dan

toleran terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, promosi keaksaraan, pemberantasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan adalah sangat besar, sehingga harus dibangun dan menjadi program pendidikan orang dewasa.

5. Tujuan-tujuan pendidikan pemuda dan orang dewasa, dipandang sebagai proses belajar sepanjang hayat adalah untuk mengembangkan otonomi dan rasa tanggungjawab rakyat dan paguyuban (komunitas), untuk memperkuat kemampuan mengurusi transformasi yang berlangsung di dalam ekonomi, kebudayaan dan masyarakat secara keseluruhan, dan untuk mengembangkan ko-eksistensi, toleransi dan peranserta warga negara yang tahu dan kreatif di dalam paguyuban-paguyuban. Pendek kata memberdayakan rakyat dan paguyuban untuk mengendalikan nasib dan masyarakatnya untuk menghadapi tantangan-tantangan di depan adalah penting, bahwa pendekatan-pendekatan belajar orang dewasa didasarkan pada warisan, kebudayaan, nilai-nilai dan pengalaman-pengalaman sebelumnya dari rakyat itu sendiri dan beragam cara di mana pendekatan yang dilaksanakan memampukan dan mendorong setiap warga negara untuk terlibat aktif dan mempunyai suara.

6. Konferensi ini mengakui keanekaragaman sistem politik, ekonomi dan sosial dan struktur pemerintahan di negara-negara anggota. Sesuai dengan keanekaragaman itu dan untuk menjamin penghormatan penuh pada hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan fundamental, maka konferensi mengakui bahwa keadaan khusus negara-negara anggota akan menetapkan langkah-langkah yang akan diperkenalkan oleh pemerintah untuk memajukan semangat dari tujuan-tujuan kita.

7. Wakil-wakil pemerintah dan organisasi yang berperanserta di dalam Konferensi Internasional Kelima tentang Pendidikan Orang Dewasa (CONFINTEA) ini telah memutuskan untuk bersama-sama

menjelajahi potensi dan masa depan pendidikan orang dewasa, secara luas dan dinamis dipikirkan dalam kerangka kerja belajar sepanjang hayat.

8. Sepanjang dasawarsa ini, proses belajar orang dewasa telah mengalami perubahan yang berarti dan pertumbuhan yang pesat, baik mengenai ruang lingkup maupun skalanya. Di dalam masyarakat berdasar pengetahuan yang sedang timbul di seluruh dunia, pendidikan orang dewasa dan berkelanjutan telah menjadi hal yang amat penting, baik dalam masyarakat maupun di tempat kerja. Permintaan baru dari masyarakat dan kehidupan kerja meningkatkan harapan yang menuntut setiap orang untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan terus-menerus sepanjang kehidupannya. Inti transformasi ini adalah peranan baru bagi negara dan timbulnya kemitraan yang diperluas dan diabdikan pada proses belajar orang dewasa di dalam masyarakat madani (sipil) *). Negara adalah tetap sebagai wahana penting untuk menjamin hak pendidikan untuk semua, terutama untuk kelompok-kelompok yang paling rawan di dalam masyarakat, seperti penduduk minoritas dan asli, dan untuk memberikan kerangka kerja kebijakan menyeluruh. Di dalam kemitraan baru yang timbul antara sektor-sektor pemerintah, swasta dan paguyuban, peranan negara sudah mulai bergeser. Ia bukan hanya penyaji layanan pendidikan orang dewasa tetapi juga penasihat, penyedia dana, dan bahkan pemantauan dan penilaian. Pemerintah-pemerintah dan mitra-mitra sosial hendaklah mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mendukung orang-seorang agar meng-

*) Masyarakat madani (civil society) adalah masyarakat yang memahami akan hak, kewenangan dan tanggungjawab mereka dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat seperti ini berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan seluruh cita-cita bangsa secara bertahap.

(Suara Karya, 2 Juli 1998, hal 1)

ungkapkan kebutuhan dan aspirasi pendidikannya, dan untuk mendapatkan akses pada kesepakatan-kesepakatan pendidikan sepanjang hayatnya. Di dalam pemerintahan, pendidikan orang dewasa tidak dibatasi hanya pada kementerian-kementerian pendidikan; semua kementerian terlibat dalam mengembangkan proses belajar orang dewasa, dan kerjasama antar departemen adalah penting. Terlebih lagi, para majikan, serikat sekerja, organisasi-organisasi non-pemerintah dan paguyuhan-paguyuhan, dan kelompok-kelompok pendidikan asli dan kaum wanita terlibat dan memikul kelompok-kelompok penduduk asli dan kaum wanita terlibat dan memikul tanggungjawab untuk berinteraksi dan menciptakan kesempatan-kesempatan untuk belajar sepanjang hayat dengan tersedianya pengakuan dan akreditasi.

9. Pendidikan dasar untuk semua berarti, bahwa pendidikan usia berapa pun mempunyai kesempatan, secara perorangan atau kolektif, untuk mewujudkan potensinya. Itu bukan hanya suatu hak, tetapi juga kewajiban dan tanggungjawab, baik kepada orang-orang lain maupun kepada masyarakat sebagai keseluruhan. Adalah penting, bahwa pengakuan hak untuk pendidikan sepanjang hayat hendaklah dibarengi oleh langkah-langkah untuk menciptakan kondisi yang diperlukan untuk melaksanakan hak ini. Tantangan-tantangan abad XXI tidak mungkin dihadapi hanya oleh pemerintah, organisasi atau lembaga saja; energi, imajinasi dan keunggulan rakyat dan peranserta mereka secara penuh, bebas dan bersemangat di dalam setiap aspek kehidupan juga diperlukan. Proses belajar pemuda dan orang dewasa merupakan alat utama dalam rangka meningkatkan kreativitas dan produktivitas yang berarti, dalam arti yang seluas-luasnya dari pengertian-pengertian ini, dan selanjutnya hal-hal ini mutlak diperlukan untuk menghadapi masalah-masalah dunia yang rumit dan saling terkait yang diakibatkan oleh perubahan yang cepat dengan kerumitan yang bertumbuh dan risiko.

10. Pemikiran baru tentang pendidikan pemuda dan orang dewasa mengajukan tantangan pada praktik-praktik sekarang ini, karena diperlukan jaringan kerja yang mangkus atau efektif dalam sistem-sistem formal dan non-formal, dan untuk inovasi dan lebih banyak kreativitas dan kelenturan. Tantangan-tantangan seperti itu hendaklah dihadapi dengan pendekatan-pendekatan baru pada pendidikan orang dewasa dalam rangka pemikiran belajar sepanjang hayat. Memajukan belajar, menggunakan media massa dan publisitas lokal, dan menawarkan bimbingan yang tak memihak merupakan tanggungjawab pemerintah, mitra sosial dan pemasok pendidikan. Tujuan akhir atau tertinggi hendaklah penciptaan masyarakat belajar yang berjanji untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

11. Keaksaraan orang dewasa. Keaksaraan dibataskan secara luas sebagai pengetahuan dasar dan keterampilan yang diperlukan oleh semua di dalam dunia yang berubah cepat dan merupakan hak asasi manusia. Di dalam setiap masyarakat, keaksaraan merupakan keterampilan yang diperlukan pada dirinya dan salah-satu fundasi bagi keterampilan-keterampilan hidup yang lain. Terdapat berjuta-juta manusia, mayoritas wanita, yang tidak mendapat kesempatan belajar atau tidak mempunyai keterampilan yang memadai untuk mampu menyatakan hak ini. Tantangannya adalah bagaimana memampukan mereka berbuat demikian. Hal ini dapat diwujudkan dengan penciptaan prakondisi belajar melalui peningkatan kesadaran dan pemberdayaan. Keaksaraan adalah juga katalisator untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, politik dan ekonomi serta belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu kami berjanji untuk menjamin tersedianya kesempatan bagi semua untuk mendapatkan dan memelihara keterampilan keaksaraan, dan untuk menciptakan lingkungan aksara di semua Negara Anggota untuk mendukung kebudayaan lisan. Penyediaan kesempatan belajar untuk

semua, termasuk mereka yang tak terjangkau dan yang dikucilkan, merupakan kepedulian yang paling mendesak. Konferensi menyambut baik prakarsa untuk memperingati dasawarsa keaksaraan dalam rangka menghormati Paulo Freire, yang dimulai pada tahun 1998.

12. Pengakuan atas *hak untuk pendidikan dan hak untuk belajar* sepanjang hayat merupakan keadaan yang sangat mendesak; hak untuk membaca dan menulis, hak untuk bertanya dan menganalisis, hak untuk mendapatkan akses pada sumberdaya, dan untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan dan kompetensi perorangan dan kolektif.

13. Pengintegrasian dan pemberdayaan kaum wanita.

Kaum wanita mempunyai hak untuk kesempatan yang sama; sebaliknya, masyarakat tergantung pada kontribusi mereka yang penuh dalam semua bidang pekerjaan dan aspek kehidupan. Kebijakan belajar pemuda dan orang dewasa hendaklah bersifat responsif terhadap kebudayaan lokal dan memberi prioritas pada perluasan kesempatan pendidikan untuk semua wanita, sambil menghormati keanekaragaman mereka dan menyingkirkan prasangka dan stereotif karena keduanya membatasi akses pada pendidikan pemuda dan orang dewasa dan membatasi keuntungan yang dapat mereka peroleh dari padanya. Setiap usaha yang membatasi hak wanita untuk keaksaraan, pendidikan dan latihan hendaklah ditolak. Beragai upaya dan langkah-langkah hendaklah diambil untuk menentang hal tersebut.

14. Budaya perdamaian dan pendidikan untuk kewarganegaraan dan demokrasi. Satu dari tantangan terbesar abad ini adalah menghapuskan budaya kekerasan dan membangun budaya perdamaian yang didasarkan pada keadilan dan toleransi di mana dialog (percakapan), saling mengakui dan bermusyawarah menggantikan kekerasan di rumah-rumah dan paguyuban, dalam lingkungan bangsa-bangsa dan antar negara.

15. Keanekaragaman dan persamaan. Proses belajar orang dewasa hendaklah memperhatikan kekayaan keanekaragaman kebudayaan dan menghormati pengetahuan dan sistem belajar tradisional dari penduduk asli; hak belajar dalam bahasa itu hendaklah dihormati dan dilaksanakan. Pendidikan orang dewasa menghadapi tantangan yang gawat dalam melestarikan dan membuat dokumen kebijakan lisian kelompok-kelompok minoritas, penduduk asli dan penduduk nomad (pengembara). Sebaiknya, pendidikan antar budaya hendaklah mendorong proses belajar antara dan mengenai berbagai kebudayaan yang berbeda dalam rangka mendukung perdamaian, hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, demokrasi, keadilan, kemerdekaan, ko-eksistensi dan keanekaragaman.

16. Kesehatan. Kesehatan adalah hak asasi manusia. Investasi dalam pendidikan adalah investasi dalam kesehatan. Belajar sepanjang hayat dapat memberi kontribusi yang besar untuk pengembangan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pendidikan orang dewasa memiliki peluang yang baik untuk menyediakan akses yang relevan, sama dan berlanjut pada pengetahuan kesehatan.

17. Keberlanjutan lingkungan. Pendidikan untuk keberlanjutan lingkungan hendaklah menjadi proses belajar sepanjang hayat yang mengakui bahwa masalah-masalah ekologis timbul di dalam konteks sosio-ekonomi, politik dan budaya. Masa depan yang berkelanjutan tidak dapat diraih tanpa dialamatkan pada nisbah antara masalah-masalah lingkungan dan paradigma-paradigma pembangunan sekarang. Pendidikan lingkungan bagi orang dewasa dapat memainkan peranan yang penting dalam menjadikan kelompok masyarakat peka dan mengerahkan mereka bersama para membuat keputusan ke arah tindakan lingkungan yang berlanjut.

18. Pendidikan dan kebudayaan asli.

Penduduk asli dan penduduk pengembara mempunyai hak atas akses semua jenjang dan jenis pendidikan yang disediakan oleh negara. Namun, mereka tidak boleh diingkari haknya untuk menikmati kebudayaan mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri. Pendidikan untuk penduduk asli dan penduduk pengembara hendaklah secara linguistik dan budaya sesuai dengan kebutuhan mereka dan memudahkan akses pada pendidikan dan pelatihan lebih lanjut.

19. Transformasi ekonomi.

Globalisasi, perubahan pola-pola produksi, meningkatnya pengangguran dan kesulitan untuk menjamin kehidupan yang aman menuntut kebijakan tenaga kerja yang lebih aktif dan investasi yang bertambah dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan yang perlu yang memampukan pria dan wanita berperan serta di dalam pasar tenaga kerja dan kegiatan-kegiatan kejuruan.

20. Akses pada informasi.

Perkembangan teknologi informasi dan teknologi baru membawa serta risiko-risiko baru yakni pengucilan sosial dan pekerjaan untuk kelompok-kelompok perorangan dan juga bisnis-bisnis yang tidak mampu menyesuaikan diri pada konteks ini. Oleh kerena itu, salah-satu peranan pendidikan orang dewasa di masa depan adalah membatasi risiko-risiko pengucilan ini, sehingga masyarakat informasi tidak kehilangan pandangan tentang dimensi manusia.

21. Penduduk yang menua (usia lanjut).

Sekarang, jumlah orang-orang yang berusia lanjut di dunia ini dikaitkan dengan jumlah penduduk seluruhnya sudah lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya dan proporsi ini masih akan meningkat. Orang-orang berusia lanjut ini ini dapat memberi sumbangan pada pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, adalah penting agar mereka mempunyai

kesempatan untuk belajar dengan syarat-syarat yang sama dan tata cara yang tepat. Keterampilan dan kemampuan mereka hendaklah diakui, dihargai dan dimanfaatkan.

22. Sejalan dengan pernyataan Salamanca, integrasi dan akses untuk penduduk yang cacat hendaklah dikembangkan. Orang-orang cacat mempunyai hak untuk kesempatan belajar yang sama, mengakui dan memenuhi kebutuhan dan tujuan pendidikan mereka, dan teknologi belajar yang tepat harus dirancang sepadan dengan kebutuhan belajar khusus mereka.

23. Kita harus bertindak dengan kesungguhan yang luar biasa untuk meningkatkan dan menjamin investasi nasional dan internasional dalam proses belajar pemuda dan orang dewasa, dan komitmen sumberdaya swasta dan paguyuban kepada mereka. Agenda untuk masa depan yang sudah kami terima di sini sudah dirancang atau didesain untuk meraih tujuan ini.

24. Kami mengundang UNESCO sebagai badan pengarah PBB di bidang pendidikan untuk memainkan peranan utama dalam mengembangkan pendidikan orang dewasa sebagai bagian integral dari sistem belajar dan mengerahkan dukungan semua mitra, khususnya mereka yang dalam system PBB, untuk memberi prioritas pada pelaksanaan Agenda Masadepan dan memberi kemudahan pada penyediaan jasa yang diperlukan untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama internasional.

25. Kami mendesak UNESCO untuk mendorong Negara-negara Anggota menerima kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang baik untuk dan mengakui penduduk yang

cacat dalam program-program pendidikan, di samping peka terhadap keanekaragaman budaya, linguistik, jender dan ekonomi.

26. Kami dengan khidmat menyatakan bahwa semua pihak akan mengikuti dari dekat gerak-lanjut pelaksanaan Deklarasi ini dan Agenda Masadepan, dengan tanggungjawab masing-masing dan saling melengkapi serta bekerjasama satu dengan yang lain. Kami sudah bertekad untuk menjamin, agar belajar sepanjang hayat akan menjadi kenyataan pada permulaan abad XXI. Untuk tujuan itu, kami berjanji kepada diri kami masing-masing untuk mengembangkan budaya belajar melalui gerakan “satu jam sehari untuk belajar” dan pengembangan satu Minggu PBB untuk Belajar Orang Dewasa.

27. Kami, berkumpul bersama-sama di Hamburg, yakin akan perlunya proses belajar orang dewasa, menjanjikan agar semua pria dan wanita hendaklah diberikan kesempatan belajar sepanjang kehidupan mereka. Untuk tujuan itu, kami akan menempa persatuan yang lebih luas untuk mengerahkan dan berbagi sumberdaya untuk membuat proses belajar orang dewasa menjadi suatu kegembiraan, suatu alat, suatu hak dan suatu tanggungjawab bersama.

(Sumber: CONFINTEA Pendidikan Orang Dewasa, Deklarasi Hamburg Agenda Mada Depan, Ditjen Diklusepora, Depdiknas, 1998)

Mother Sport

MOTHER OF SPORT atau ibu dari seluruh cabang olahraga, inilah gelar yang disandang oleh salah satu cabang olahraga yang termasuk sebagai cabang olahraga prioritas yang mendapat perhatian agar selalu dan senantiasa dikembangkan permasyarakatannya di masyarakat bahkan hingga kelak diharapkan dapat berprestasi. Inilah dia cabang olahraga 'ATLETIK'.

PERISTILAHAN DALAM ATLETIK

Sebelum jauh kita bicara tentang atletik maka lebih baik bila kita juga mengenal tentang peristilahan yang ada dan digunakan dalam cabang olahraga atletik itu sendiri.

Orang sampai saat ini masih banyak menyamakan 2 (dua) peristilah-an antara:

- ❖ Perlombaan dan
- ❖ Pertandingan

Perlu kita ingat bahwa 2 (dua) istilah di atas yaitu antara perlombaan dan pertandingan sebenarnya terdapat ciri-ciri tersendiri dan penggunaannya harus berbeda untuk nomor tertentu dalam berbagai cabang olahraga.

Perlombaan mempunyai ciri-ciri antara lain:

- ❖ peserta (atlit) menuju satu arah yang sama
- ❖ peserta (atlit) tidak saling berhadapan
- ❖ peserta (atlit) tidak boleh saling bersinggungan badan
- ❖ pencapaian hasil dilihat dengan waktu, jarak (ketinggian atau kejauhan) dan keindahan/keluwesan.

Pertandingan ciri-cirinya antara lain:

- ❖ peserta (atlit) saling berhadapan
- ❖ peserta (atlit) kebanyakan saling bersinggungan badan
- ❖ dibatasi oleh net/jaring atau garis
- ❖ pencapaian hasil dilihat dengan angka/biji

Dengan merujuk pada 2 (dua) istilah di atas berikut ciri-cirinya, maka seluruh nomor yang ada dalam cabang olahraga atletik lebih cocok dikategorikan sebagai cabang olahraga yang diperlombakan.

Atletik sebagai ibu dari seluruh cabang olahraga, karena sebelum orang mengenal cabang olahraga lainnya, maka atletik sudah ada bahkan yang lebih pokok lagi semua nomor yang ada dalam atletik merupakan dasar-dasar manusia hidup dalam kesehatannya secara wajar dan alamiah seperti:

- ❖ gerakan berjalan
- ❖ gerakan berlari
- ❖ gerakan melompat, dan
- ❖ gerakan melempar

Oleh karena itu ATLETIK disebut *Ibu dari Seluruh Cabang Olahraga*.

NOMOR-NOMOR ATLETIK

Atletik secara garis besar sebenarnya hanya terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu "JALALOLE":

- ❖ **JA** adalah *jalan*
- ❖ **LA** adalah *lari*
- ❖ **LO** adalah *lompat*
- ❖ **LE** adalah *lempar berikut lontar dan tolak*

Nomor-nomor tiap bagian Altetik tersebut seperti berikut ini:

1. Nomor-nomor dalam *jalan*:

- ❖ Jalan santai
- ❖ Jalan cepat

Kedua nomor jalan ini berkenaan dengan jarak tempuhnya adalah sama, yaitu mulai 500 m sampai jarak 10.000 m (10 Km) perbedaan-nya hanya pada unsur gerakan (tubuh bagian tangan dan kaki). Jalan santai gerakan tubuh bagian tangan dan kaki normal seperti biasanya dengan posisi dua tangan disamping badan gerak depan belakang dan gerakan kaki posisi telapaknya selalu datar, sedangkan jalan cepat gerakan tubuh (tangan) siku ditekuk ayunan depan dada dan gerakan telapak kaki dimulai dari bagian tungkai menggelinding ke depan begitu seterusnya dan kedua telapak kaki selalu menyentuh lantai/tanah.

2. Nomor-nomor dalam *lari*:

- ❖ jarak pendek antara 50 m sampai dengan 400 m
- ❖ jarak menengah antara 800 m sampai dengan 1500 m dan
- ❖ jarak jauh 3000 m ke atas berikut maraton (42.195 Km)

Berbeda dengan gerakan nomor jalan, gerakan lari selalu terdapat gerakan melayang diudara dengan posisi pemberangkatan (start) yang berbeda untuk ketiga nomor tersebut.

Posisi start untuk lari jarak pendek menggunakan start jongkok, jarak menengah menggunakan start melayang dan jarak jauh berikut marathon menggunakan start berdiri.

3. Nomor-nomor dalam lompat:

Berkenaan dengan nomor lompat perlu kita ketahui bahwa antara lompat dengan loncat ialah dua istilah yang berbeda. Lompat berarti gerakan tolak yang menggunakan 1 (satu) kaki tumpu sedangkan loncat adalah gerakan tolak dengan menggunakan 2 (dua) kaki tumpu.

Adapun nomor-nomor yang ada dalam lompat ialah:

- ❖ lompat jauh
- ❖ lompat tinggi
- ❖ lompat galah, dan
- ❖ lompat jangkit (hop step and jump/treaple jump)

Dari nomor-nomor tersebut maka terdapat beberapa macam gaya seperti.

Lompat jauh terdiri dari:

- ❖ lompat jauh gaya jongkok
- ❖ lompat jauh gaya berjalan di udara
- ❖ lompat jauh gaya melenting/menggantung

Lompat tinggi terdiri dari:

- ❖ lompat tinggi gaya gunting
- ❖ lompat tinggi gaya guling
- ❖ lompat tinggi gaya guling sisi
- ❖ lompat tinggi gaya fosbury flop

Lompat galah terdiri dari:

- ❖ lompat galah gaya guling
- ❖ lompat galah gaya guling sisi

Lompat jangkit terdiri dari:

- ◆ lompat jangkit gaya jongkok
- ◆ lompat jangkit gaya berjalan di udara
- ◆ lompat jangkit gaya melenting/menggantung

4. Nomor-nomor dalam lempar:

Nomor lempar yang juga termasuk di dalamnya lontar dan tolak adalah nomor yang dibantu dengan tangan hanya saja alatnya yang berbeda, nomor-nomor atletik dimaksud seperti berikut:

- ◆ lempar cakram,
- ◆ lempar lembing,
- ◆ lontar martil, dan
- ◆ tolak peluru

Adapun ukuran-ukuran alat di atas terdiri dari:

- ◆ cakram
 - putra: tebal 44 - 46 mm, panjang lingkaran 219 - 221 mm
 - putri : tebal 37 - 39 mm, panjang lingkaran 180 - 182 mm
- ◆ lembing beratnya untuk putra 800 gram, putri 600 gram
- ◆ martil beratnya 7.260 kg dan panjang 1175-1215 mm
- ◆ peluru beratnya untuk putra 7.26 kg, putri 4.00 kg

Perlu diketahui pula oleh kita semua bahwa selain nomor yang telah disebutkan di atas, dalam atletik sebetulnya masih terdapat lagi yang lainnya berupa nomor khusus seperti:

- ◆ lari estafet/lari sambung 4 x 100 m dan 4 x 400 m
- ◆ lari gawang 100 m, 200 m dan 400 m
- ◆ lari lintas alam/cross country serta lari 3000 m steeple chase.

■(Darnowo, PB BPKB Jawa Barat)





SEPTEMBER tahun 2000

para peduli Pendidikan Luar Sekolah (PLS) mulai meluncurkan acara simpatik untuk para petinggi tingkat menengah birokrat maupun non birokrat, program tersebut adalah *Sosialisasi PLS 2000* yang dikemas dalam wujud unjuk konsep-konsep berikut terapannya serta kemampuan dan produk-produk warga belajar. Namanya juga Sosialisasi, segala kemampuan dicurahkan untuk sukses penyelenggaranya. Tempatnya pun disesuaikan dengan aktivitas keseharian para petinggi kelas menengah ke atas, yakni *Hotel Sahid Jakarta*.

Tujuan yang diharapkan dari penyelenggaraan Sosialisasi PLS 2000 adalah tergugahnya hati para Pejabat Kelas Menengah ke atas terhadap kegiatan-kegiatan PLS di Indonesia sehingga dampak dari kegiatan tersebut peranan PLS akan lebih merata dan meningkat di masyarakat.

Peserta Sosialisasi lumayan banyak (tidak sempat dihitung), dari Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat maupun instansi Pemerintah termasuk BPKB Jawa Barat dan BPKB Jawa Tengah yang disponsori oleh Direktorat Tenaga Teknis Ditjen Diklusepora.

Sosialisasi PLS yang diselenggarakan selama 3 hari (tanggal 19 s.d. 21 September 2000) maunya sich dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia namun kenyataan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan dihadiri oleh

Catatan dari:

Sosialisasi PLS 2000

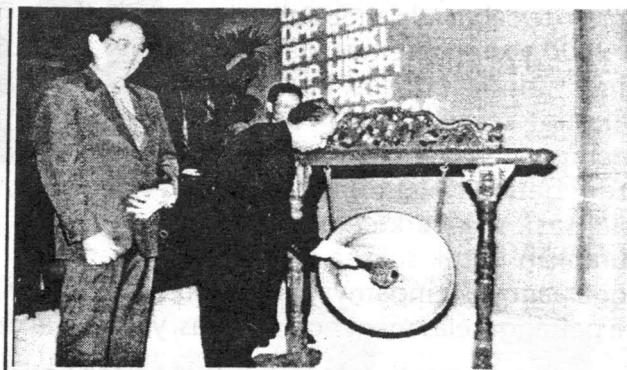
Penulis: *Setia*
Foto: *Setia*

para pejabat Diklusepora mulai dari Dirjen, para Direktur Ka. Kanwil Depdiknas dan Kepala SKB se Indonesia. Acara penutupan Sosialisasi PLS ditutup oleh Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga atas nama Menteri Diknas.

Komentar yang muncul dari dewan redaksi Gita Setra adalah penyelenggaraan tersebut cukup sukses, namun kurang greget karena tidak dimeriahkan oleh para warga belajar Paket A dan Paket B (merupakan program-program yang dikenal orang pada umumnya sebagai primadona PLS), tapi justru yang unjuk kebolehan adalah mereka yang berasal dari persekolahan (lomba cerdas cermat bahasa Inggris tingkat SLTP)

Warga belajar Paket A dan Paket B seperti diketahui merupakan orang-orang yang bermasalah (sosial, ekonomi dan budayanya). Jadi bagaimana para kelas menengah mau peduli kasih? Kalau yang tampil justru orang yang sudah mapan ekonominya.

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Yahya A. Muhaimin didampingi Dirjen Diklusepora Makmuri Muchlas saat memukul gong tanda dimulainya Sosialisasi PLS 2000



Gambar di atas, saat Menteri Pendidikan Nasional memukul Gong sebagai isyarat dimulainya gaum peduli kasih bagi warga belajar PLS, namun karena yang unjuk kemampuan hanya warga belajar PLS yang mampu maka *Gaum Peduli Kasih* pun tidak mengena dihati para pejabat kelas menengah ke atas.

Wajar kalau program Sosialisasi PLS 2000 ada kekurangannya karena setahu kami kegiatan tersebut baru kali pertama diselenggarakan di Indonesia.

Mudah-mudahan lain kali diundang para warga belajar PLS beneran!
■(Surono, PB BPKB Jawa Barat)



Aneka Kegiatan

Unjuk Kemampuan

KBO

Binaan SKB

Se Jawa Barat

Kegiatan unjuk kemampuan kelompok Berlatih Olahraga (KBO) binaan SKB se Jawa Barat di gelar pada tanggal 12 sampai dengan 14 September 200 bertempat di SKB Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat. Jumlah peserta 23 kontingen/SKB (798 orang atlit + official) dari 26 SKB yang ada. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan/dilombakan adalah cabang olahraga tradisional egrang, cabang olahraga prestasi meliputi; atletik, bola voli, tenis meja dan sepak takraw.

Pembukaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Dirjen Diklusepora Depdiknas Prof. DR. H. Makmuri Muchlas, Phd, Sp.Kj yang sebelumnya dilakukan acara laporan Ketua Panitia oleh Kepala SKB Kabupaten

Pandeglang, Drs. Mahmud Marua, sambutan oleh Buptai Kabupaten Pandeglang dan Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.

Keluar sebagai juara umum ujuk kemampuan KBO binaan SKB se Jawa Barat adalah SKB Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat. Selamat kepada Kepala SKB Kabupaten Ciamis dan jajarannya.

**Hasil Akhir Perolehan Medali Unjuk Kemampuan
KBO Binaan SKB se Jawa Barat tahun 2000**

No.	SKB	Medali			Keterangan Juara
		Emas	Perak	Perunggu	
1.	Ciamis	3	2	1	I
2.	Pandeglang	3	1	1	II
3.	Kuningan	3	—	2	III
4.	Kota Bogor	1	3	—	IV
5.	Majalengka	1	2	—	V
6.	Tasikmalaya	1	—	—	VI
7.	Cirebon	1	—	—	VI
8.	Serang	1	—	—	VI
9.	Sumedang	—	1	1	VII
10.	Kota Bandung	—	1	1	VII
11.	Lebak	—	1	1	VII
12.	Purwakarta	—	1	—	VIII
13.	Kab. Bogor	—	1	—	VIII
14.	Tangerang	—	1	—	VIII
15.	Kab. Bandung	—	—	2	IX
16.	Indramayu	—	—	2	IX
17.	Karawang	—	—	1	X
18.	Kab. Sukabumi	—	—	1	X
19.	Garut	—	—	1	X
20.	Kota Sukabumi	—	—	—	Tanpa medali
21.	Bekasi	—	—	—	Tanpa medali
22.	Cianjur	—	—	—	Tanpa medali
23.	Subang	—	—	—	Tanpa medali

■(Tatang Somantri, PB BPKB Jawa Barat)